

Usulan Program RAN OGI 2023-2024

INSTITUSI PENGUSUL: SUARISE	
KATEGORI USULAN: BARU	
KESESUAIAN DENGAN RPJMN 2020-2024:	
Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik (A.74 hal 751)	
Prop: Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah melalui Penata Kelolaan Komunikasi Publik (A.75 hal 752)	
Indikator: Terintegrasinya tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik	
Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Kominfo (059.A.1 hal 1271)	
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik: Penata Kelolaan Bidang Komunikasi Publik - Penata Kelolaan Komunikasi Publik (059.B.9 hal 1280)	
Indikator: Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D	
USULAN PROGRAM	
Stakeholders Pelaksana:	: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen IKP, Ditjen APTIKA)
Judul Komitmen:	: Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital untuk Informasi, Konten, dan Aset Digital di Indonesia
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini	: Implementasi asas keterbukaan informasi publik belum optimal. Hal ini akibat Informasi, Konten, dan Aset digital (termasuk website, aplikasi, media sosial) yang dimiliki oleh sektor pelayanan publik belum sepenuhnya layak akses bagi disabilitas. Sehingga tidak mendukung prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu dibutuhkan pedoman aksesibilitas digital untuk sektor pelayanan publik termasuk layanan informasi yang menerapkan prinsip universal design yang layak akses bagi semua, termasuk bisa diakses oleh seluruh jenis disabilitas.
Apa bentuk komitmennya	: Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital untuk Informasi, Konten, dan Aset Digital di Indonesia
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik	: Setiap sektor pelayanan publik akan dapat menyediakan informasi, konten, dan akses digital yang layak akses sehingga dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik, peningkatan partisipasi publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah	:	<p>Tersedianya pedoman aksesibilitas digital untuk informasi, konten, dan aset digital dapat mewujudkan transparansi informasi yang layak diakses oleh semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.</p> <p>Informasi yang mudah diakses membuka kesempatan yang sama bagi setiap orang sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik di berbagai bidang, diantaranya partisipasi politik, ekonomi digital, transportasi, hingga tenaga kerja inklusif.</p> <p>Melalui keterbukaan informasi dan peningkatan partisipasi publik, aksesibilitas digital dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang pada akhirnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif.</p>	
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	:	<p>RPJMN 2020-2024</p> <p>Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dalam Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik: Penataan Kelolaan Komunikasi Publik</p> <p>SDGs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara • Target 10.2: Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama, atau kemampuan ekonomi, atau status lainnya <p>Peraturan Pemerintah No.70/2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan I berupa peningkatan pelayanan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas • Kebijakan IV dalam penyediaan sistem komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas <p>KEM PPKF 2023</p> <p>Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang mencakup infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital</p>	
Penerima Manfaat	:	Penyandang Disabilitas, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat/Daerah, Swasta, LSM, OPD	
Informasi Tambahan	:	RANHAM 2021-2025 Pasal 3: Empat sasaran strategis dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, pemajuan HAM, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat	
Sumber Dana Pengusul:	:	World Bank, GIZ, ADB, USAID, UK AID	
Indikator Capaian dengan Target Terukur	:	Waktu Mulai	Waktu Selesai
1. Tersedianya pedoman aksesibilitas digital untuk website (teks, foto, video, infografis);	:	Januari 2023	Desember 2024
2. Tersedianya pedoman aksesibilitas digital untuk dokumen digital (word, ppt, excel, pdf);	:		

Lampiran II

Nomor : 11035/PP.06.02/D.7/T/08/2022

Tanggal : 15 Agustus 2022

3. Tersedianya pedoman aksesibilitas digital untuk media sosial (teks, foto, video, infografis);	:		
4. Tersedianya pedoman aksesibilitas digital untuk aplikasi digital (ios dan android).	:		
Informasi Kontak			
Nama PIC dari OMS, Departemen/Jabatan, Email, Nomor Hp	:	1. Rahma Utami, Founder & Accessibility Consultant Suarise, rahmaut@suarise.com , 081388894958 2. Iin Kurniati, Public and Government Relations Suarise, iin.kurniati@suarise.com , 085697742381	
Nama PIC dari K/L Departemen/Jabatan, Email, Nomor Hp	:		

Lampiran II

Nomor : [11035](#)/PP.06.02/D.7/T/08/2022

Tanggal : 15 Agustus 2022